

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI RT 03 JALAN POROS KEBON AGUNG KELURAHAN LEMPAKE

Tulus Sardo Simanullang¹

Abstrak

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tetapi permasalahannya adalah pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat di sebagian daerah memunculkan ide/gagasan untuk melakukan swadaya sebagai partisipasinya dalam pembangunan, permasalahannya adalah tidak semua masyarakat terlibat secara mental dan fisik di dalam partisipasi, padahal dasar dari partisipasi adalah kesukarelaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diberi judul : Partisipasi Masyarakat Terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan di RT 03 Jalan Poros kebon Agung Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di RT 03 Jalan Poros Kebon Agung Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan menggunakan tehnik snowball (bola salju) yaitu teknik metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya . Penelitian, informan dalam penelitian ini adalah ketua RT dan masyarakat di RT 03 jalan Poros Kebon Agung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi serta pengumpulan data sekunder dengan cara dokumentasi. Landasan teori dari penelitian ini adalah teori evolusi Emile Durkheim tentang perubahan sosial yaitu solidaritas mekanis dan organisasi atau perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang telah mengenal adanya pembagian kerja yang nampak dari perilakunya melalui bentuk-bentuk solidaritas sosial. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didasari oleh kesamaan rasa pada suatu masalah yang dialami bersama. Pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terbilang rendah, karena dalam penyampaian gagasan/ide hanya ada beberapa orang saja. Pada tahap pelaksanaan melihat dari bentuk sumbangan yang diberikan tenaga, uang dan material menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh masyarakat lebih signifikan sumbangan dalam bentuk tenaga dibanding uang dan material.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tulusmanulang@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkat dan berubah kearah yang lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan Jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas, karena itu jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah.

Dalam teori pembangunan yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll. Infrastruktur Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi (jalan) akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa. Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang berhubungan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainsebagainya.

Jalan dalam hal ini sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntungkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel Sesuai PP Nomor 34 Tahun 2006Pasal1.

Pembangunan infrastruktur jalan kelurahan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dan pemeliharaan). Pelibatan masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur jalan pedesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat

dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah diperlukan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat. Demikian juga halnya dengan pembangunan sosial yang merupakan bagian dari pada pembangunan nasional yang dilakukan pada saat ini. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk suatu dukungan kerja sama yang baik dan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, maupun kerjasama antara masyarakat itu sendiri.

Salah satu daerah yang mendapat perhatian penulis yaitu Jalan Poros Kebon Agung RT 03 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kalimantan Timur. Menurut pengamatan penulis yang lakukan wilayah tersebut cukup luas dan mempunyai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat yang beragam, misalnya suku Jawa, Banjar, Bugis, Batak, Dayak dll. Keberagaman tersebut merupakan potensi apabila dapat dikelola dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan dimana masyarakat tersebut bisa saling bertukar pengalaman.

Infrastruktur jalan yang ada di daerah di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Kalimantan Timur, baru-baru ini sudah terbeton, yang dimulai dari kota kekelurahan hingga sampai kekelurahan yang lain walaupun belum semua berbeton dan masih terdapat lubang-lubang dipermukaan sebagian jalan. Kondisi ini telah melancarkan seluruh mobilitas masyarakat setempat. Perkembangan pembangunan infrastruktur jalan ini juga mempunyai hubungan yang erat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Definisi pertama yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mengartikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Sedangkan definisi kedua, dan berlaku universal adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dalam penelitian ini, definisi partisipasi masyarakat lebih dekat pada apa yang diungkapkan oleh Soetrisno di atas yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana (pemerintah) dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat diukur dari besarnya peran dan wewenang masyarakat dalam menentukan, menyediakan mengaudit dan memelihara infrastruktur jalan yang dibangun.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Kelurahan. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain.

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih murah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Lin Herlina (2003) juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan (*empowerment*) dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi yang dilihat dari besaran kerelaan atau keiklasan dari partisipasi (masyarakat) dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan dalam ketetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan keputusan oleh pihak luar atau ditentukan oleh pemerintah, maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Selain itu ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (*grassroots*), berfokus pada pendistribusian kue pembangunan secara merata,

berfungsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri dan percaya bahwa partisipan dapat mempengaruhi hasil, Hetifa Sj Sumarto (2003).

Pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam penyediaannya. Untuk itu membagi tingkatan partisipasi berdasarkan kerelaan. Berdasarkan peran dan wewenang yang ada masyarakat sebagai partisipan. Wewenang kaitannya dengan tanggungjawab yang ada pada pemerintah. Dalam konteks ini, jika masyarakat ikut berperan dalam memberi informasi namun pemerintah tidak memberikan wewenangnya pada masyarakat untuk berkolaborasi maka partisipasi ini pada tingkatan partisipasi pasif. Sedangkan perang kaitannya dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat mulai dari ikut bekerja dengan bayaran, ikut bekerja tanpa bayaran, memilih opsi yang diberikan, ikut merencanakan hingga merencanakan dan melaksanakan secara mandiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a) Usia, b) Pendidikan, c) Pekerjaan dan Penghasilan, dan d) Lamanya Tinggal.

Bentuk partisipasi

Ada dua bentuk partisipasi yang di kemukakan oleh Subandiyah (1982:2) yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang di berikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

Ada beberapa bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekeompok orang yang membentuk suatu sistem yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan terbuka.

Masyarakat merupakan sejumlah manusia adalah salah satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama seperti:sekolah,keluarga,perkumpulan,negara adalah masyarakat.

Dalam suatu perkembangan daerah,masyarakat dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat maju dan masyarkat sederhana.Masyarakat maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir untuk kehidupan yang akan di capainya dengan bersamaan meskipun berbeda golongan.Sedangkan masyarakat sederhana adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang primitif,yang hanya membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat awal mulanya terbentuk dari masyarakat kecil yang artinya sekumpulan orang.Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala kepala keluarga,kemudian dari kelompok keluarga membentuk sebuah RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun.dusun pun akan membentuk Desa(kelurahan),Kecamatan,Kabupaten,Provinsi,Negara.

Pembangunan

Indonesia sebagai negara berkembang, membutuhkan sebuah kerja keras seluruh pihak dalam meningkatkan bangsa Indonesia menuju suatu negara yang maju. Hal ini, tentu tidak hanya diisi atau di lakukan oleh pemerintah, tetapi seluruh elemen dalam negara Indonesia.

Sejarah panjang proses terbentuknya negara Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia terbentuk atau berdiri atas dasar seluruh pihak untuk melebur dan membentuk suatu engara yang kini dikenal dengan Indonesia. Suatu negara yang tengah beranjak, diperlukan sebuah pembangunan, yang melihat dari berbagai sisi.

Di Indonesia istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju kekeadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam pengertian pembangunan, para ahli kemudian memberikan definisi yang juga bermacam-macam sama halnya dengan perencanaan.

Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Definisi dari pembangunan adalah perkataan yang digunakan secara luas dalam seluruh media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang biasa diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari timur dan juga barat. Walaupun sangat sering diucapkan dan didengar namun pengertian pembangunan begitu luas cakupannya.

Pengertian pembangunan juga butuh dihayati sebelum seseorang dapat memahami keseluruhan proses dan juga teori dari pembangunan. Usaha tersebut konsep pembangun jauh lebih suka dari pada memahmi proses dan teori dari pembangunan. Namun terdapat beberapa pengertian pembangunan atau definisi pembangunan yang dapat dikatakan bahwa pengertian pembangunan adalah konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, normatif atau hak keperluan asas, dan environmentalisme.

Infrastruktur

Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa “infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Menurut Mankiw (2003:38) infrastruktur merupakan “wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”.

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2003:32), bahwa “sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat”.

Pengertian jalan

Menurut Adji Adis asmita (2011:79), mengatakan bahwa “jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau serta di atas permukaan air”.

Menurut Rinaldi Mirsa (2011:54), mengatakan bahwa “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sesuai dengan Nomor 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. Pemberdayaan masyarakat,

3. Pelayanan masyarakat,
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan
5. Fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan, Lurah dibantu perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situs yang alamiah.

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Nyata

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memyumbangkan Tenaga

Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan yang dapat menunjang keberhasilan yang ingin dicapai.

Seperti yang telah disampaikan oleh ketua RT 03, masyarakat di kelurahan Lempake jalan Poros Kebon Agung RT 03 diharuskan ikut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan seperti yang telah disepakati bersama, namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilaksanakan, yang ikut berpartisipasi hanya beberapa warga saja. Yang terlibat dalam proses kegiatan kebanyakan masyarakat dapat menyumbangkan tenaga saja dibandingkan dengan menyumbangkan material dan uang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sangat minim kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi berdasarkan informasi yang didapatkan dari ketua RT 03 Kelurahan Lempake kesimpulan dari hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat kurang kesadaran dan kurang peduli terhadap keadaan sekitar.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencanaan. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat diukur dengan kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun infrastruktur jalan yang

pembiayaannya dari pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil yang dicapai.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental setiap masyarakat itu sendiri. Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat RT harus diusahakan adanya perubahan sikap perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Partisipasi menyebabkan terjalannya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pemimpin, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat tersebut berdaya guna dan efektif.

Partisipasi dalam Bentuk Menyumbangkan Materil

Material adalah zat atau benda yang darimana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Material juga merupakan zat yang penting keberadaanya penempatan dalam ruang dan sifat-sifat mekaniknya. Misalnya bahan bangunan, bahan untuk membuat mesin dan peralatan.

Seperti yang telah disampaikan oleh ketua RT 03, masyarakat yang terlibat dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur jalan hanya beberapa masyarakat/waga yang menyumbangkan material misalnya seperti memberikan skop, cangkul dan sebagainya, sebagian warga membawa makan dan minuman untuk warga yang bekerja supaya warga mendapatkan tenaga yang maksimal dan semangat.

Partisipasi Dalam Bentuk Menyumbangkan Uang

Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran dan jasa.

Ketua RT 03 menyampaikan bahwa tidak ada bentuk partisipasi berupa menyumbangkan uang dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Karena masyarakat tersebut tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya masyarakat tidak dapat menyumbangkan uang dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tidak Nyata

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Pemikiran atau Ide

Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas.

Masyarakat RT 03 Kelurahan Lempake memberikan saran mereka, menyarankan lebih banyak melibatkan masyarakat RT 03 dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, akan tetapi keterlibatan masyarakat masih rendah di dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat terus memberikan saran kepada ketua RT untuk lebih tegas dan melakukan sosialisasi ke tiap rumah atau setiap keluarga agar lebih menyadarkan diri dalam berpartisipasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk nyata
 - a. Menyumbangkan tenaga
Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang di berikan oleh warga Rt 03 masih kurang dikarenakan adanya kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bisa ditinggalkan
 - b. Menyumbangkan material
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk menyumbangkan material masih sangat kurang
 - c. Menyumbangkan uang
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa warga di Rt 03 jalan Poros kebon Agung, bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk menyumbangkan uang masih sangat rendah. hanya ada sebagian warga saja yang masih berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
2. Bentuk partisipasi dalam bentuk tidak nyata
 - a. Memberikan saran
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di rt 03 banyak memberikan saran dan masukan-masukan agar lebih banyak melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan dan memberikan saran kepada ketua Rt agar lebih tegas terhadap warga yang tidak ikut berpartisipasi.

Saran

1. Sebaiknya masyarakat yang sudah memiliki kemauan kuat melakukan kegiatan gotong royong dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk apaun itu, harus mau mengajak dan menghimbau warga yang lainnya agar mereka terpanggil untuk ikut melelakukan kegiatan tersebut. Selain itu warga Rt 03 jalan Poros Kebon Agung harus mempertahankan nilai-nilai dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kerukunan serta keharmonisan dalam lingkungan bertetangga`

2. Sebaiknya ketua Rt 03 jalan Poros Kebon Agung memberikan pengarah langsung kepada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi agar bertanggung jawab di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh ketua Rt dan keputusan bersama
3. Sebaiknya pemerintah dan instansi terkait memberikan motivasi yang tinggi seperti memberikan teguran atau peringatan kepada warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dalam pembangunan infrastruktur jalan sehingga masyarakat jera.

Daftar Pustaka

- Nuridin, Ali. 2000. *Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam Pemeliharaan Prasarana P3DT: Tasikmalaya*.
- Herlina, Lin. 2003. *Partisipasi sebagai salah satu Determinan dalam Pembangunan Desa*. Tesis ITB.
- kartodirjo, Suryono, Cslamet. 1992. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Surakarta.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *"Menuju Masyarakat Partisipatif"* Yogyakarta: Kanasius (anggota IKAP).
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Semarang: Planologi UNDIP.
- Ros, murray G., and B.W. Lippin. 1967. *Community organization: theory, principles and practice*. Second Edition. New York: Harper & Row publisher.
- Subandiyah. 1982. *Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di SD se-Jawa Tengah*. Skripsi. FIP-UNY.